

IMPLEMENTASI KEBIJAKAN DAN DAMPAK PROGRAM PARENTING PADA PUSAT PEMBELAJARAN KELUARGA (PUSPAGA) DI KECAMATAN SUMBAWA

Sri Wahyuni¹, Ahmad Yamin^{2*}, dan Wawan Hermansyah³

¹Manajemen Inovasi, Sekolah Pascasarjana, Universitas Teknologi Sumbawa, Indonesia

²Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Teknologi Sumbawa, Indonesia

³Seni Musik, Fakultas Psikologi dan Humaniora, Universitas Teknologi Sumbawa, Indonesia

Corresponding author: ahmad.yamin@uts.ac.id

ABSTRAK

Pengasuhan yang baik dari orang tua memiliki pengaruh yang sangat besar terhadap perkembangan moral anak ketika dewasa. Pada dasarnya, orang tua merupakan lingkungan pertama bagi anak untuk mendapatkan pengetahuan, pemahaman tentang pola asuh yang diterima anak dalam lingkungan keluarga sangat penting bagi masa depan anak. Dalam keluargalah anak dipersiapkan untuk membangun pengetahuan tentang perkembangan sebelum memasuki tingkatan-tingkatan perkembangannya dunia lainnya seperti dunia orang dewasa, bahasa, adat istiadat dan kebudayaan tujuan penelitian ini adalah 1. Untuk mendeskripsikan implementasi kebijakan pada program *parenting* yang dilakukan oleh Pusat Pembelajaran Keluarga (PUSPAGA) Kecamatan Sumbawa ; 2. Untuk mendeskripsikan dampak program *parenting* yang dilakukan oleh Pusat Pembelajaran Keluarga (PUSPAGA) Kecamatan Sumbawa. Penelitian ini menggunakan penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif, teknik pengumpulan data melalui wawancara, observasi dan dokumentasi, dengan informan kunci seperti psikiater, koordinator program, ketua program dan orang tua. Hasil penelitian bahwa 1) implementasi kebijakan berjalan linier dari kebijakan publik, pelaksana, dan kinerja kebijakan publik. Adapun Indikator kinerja kebijakan antara lain: a) Tujuan dan standar kebijakan b) Sumber daya c) Komunikasi antar organisasi mengenai aktivitas implementasi, d) Karakteristik organisasi pelaksana, e) Sikap para pelaksana, f) Lingkungan politik, sosial, dan ekonomi. 2) Pengukuran dampak dibagi menjadi 2 yaitu: a) ukuran dampak langsung, dan b) ukuran dampak tidak langsung. Kedua hal tersebut sudah dapat tercatat pada pengelolaan puspaga di kecamatan sumbawa. Dengan demikian maka dapat disimpulkan bahwa implementasi kebijakan berjalan linier dari kebijakan publik, pelaksana, dan kinerja kebijakan publik. Dampak dibagi menjadi 2 yaitu: 1) ukuran dampak langsung 2) ukuran dampak tidak langsung.

Kata Kunci: Dampak; Implementasi Kebijakan; Parenting.

ABSTRACT

Good parenting from parents has a huge influence on a child's moral development as an adult. Basically, parents are the first environment for children to gain knowledge. Understanding the parenting style that children receive in the family environment is very important for the child's future. It is in the family that children are prepared to build knowledge about development before entering other levels of development in the world such as the world of adults, language, customs and culture. The objectives of this research are 1. To describe the implementation of policies in the parenting program carried out by the Family Learning Center (PUSPAGA) Sumbawa District; 2. To describe the impact of the parenting program carried out by the Sumbawa District Family Learning Center (PUSPAGA). This research uses descriptive research with a qualitative approach, data collection techniques through interviews, observation and documentation, with key informants such as psychiatrists, program coordinators, program heads and parents. The research results show that 1) policy implementation runs linearly from public policy, implementers, and public policy performance. The policy performance indicators include: a) Policy objectives and standards b) Resources c) Communication between organizations regarding implementation activities, d) Characteristics of implementing organizations, e)

Attitudes of implementers, f) Political, social and economic environment. 2) Impact measurement is divided into 2, namely: a) direct impact measurement, and b) indirect impact measurement. Both of these things can be recorded in the management of puspaga in Sumbawa sub-district. Thus, it can be concluded that policy implementation runs linearly from public policy, implementers, and public policy performance. Impact is divided into 2, namely: 1) direct impact size 2) indirect impact size.

Keywords: *Impact; Policy Implementation; Parenting.*

1. PENDAHULUAN

Keluarga sebagai satuan unit sosial terkecil merupakan lingkungan pendidikan yang paling utama dan pertama yang artinya, keluarga merupakan lingkungan yang paling bertanggung jawab untuk mendidik anak-anak. Mengasuh dan membesarkan anak secara umum merupakan tanggung jawab kedua orang tua (Djamarah, 2014 : 33). sebagaimana firman Allah dalam Al-Qurán yang artinya : ‘dan perintahkanlah kepada keluargamu mendirikan shalat dan bersabarlah kamu dalam mengerjakannya. Kami tidak meminta rezki kepadamu. Dan akibat (yang baik) itu adalah bagi orang yang bertakwa.’(QS. Thaha ayat 32).

Berdasarkan regulasi yang dikeluarkan oleh Pemerintah Republik Indonesia dalam bentuk Undang-Undang. Bahwa di dalam Pasal 13 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, sebagaimana telah diubah oleh Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, bahwa anak sebagai bagian dari masyarakat terkecil dalam keluarga yang mempunyai hak untuk dilindungi. Oleh sebab itu parenting adalah pola asuh yang diberikan kepada anak khususnya kepada orang tua yang kurang terampil dalam mendidik anak. Kejadian yang sering terjadi yang kami rasakan atau yang pernah kami advokasi di dinas kami DP2KBP3A Kabupaten Sumbawa bahwa banyak sekali kasus-kasus yang menimpa anak hal itu adalah karena kurang terampilnya orang tua dalam mendidik anak.

Karena kurang terampilnya orang tua dalam mendidik anak maka diperlukan parenting, parenting ini adalah sebuah model pola asuh yang diterapkan dalam mendidik anak yang diberikan advokasi kepada orang tua karena kecenderungan yang terjadi adalah bahwa banyak orang tua yang mana tingkat pendidikannya rendah tentu akan berpengaruh terhadap pola pendidikan anak di dalam keluarga, banyak beberapa ahli yang mengatakan tentang pola mendidik anak ada yang otoriter, demokratis ada yang penuh kasih sayang dan lain sebagainya, dalam hal ini kami selaku instansi yang berhubungan langsung dengan orang tua dan juga anak, maka diperlukan sebuah implementasi kebijakan dalam bentuk Pusat Pembelajaran Keluarga (Puspaga). Puspaga ini adalah sebagai wadah, dalam penelitian ini kami spesifikasikan di Kecamatan Sumbawa yang terdiri dari 8 Kelurahan yaitu Kelurahan Samapuin, Kelurahan Pekat, Kelurahan Seketeng, Kelurahan Brang Bara, Kelurahan Bugis, Kelurahan Uma Sima, Kelurahan Lempeh dan Kelurahan Brang Biji.

Berangkat dari latar belakang itu maka kami merumuskan permasalahan yaitu 1) bagaimana implementasi kebijakan pada program parenting yang dilakukan oleh Pusat Pembelajaran Keluarga di Kecamatan Sumbawa, 2). bagaimana dampak program parenting yang dilakukan oleh Pusat Pembelajaran Keluarga Kecamatan Sumbawa. Dengan tujuan 1) untuk mendeskripsikan implementasi kebijakan pada program parenting yang dilakukan oleh Pusat Pembelajaran Keluarga (Puspaga) di Kecamatan Sumbawa, 2) untuk mendeskripsikan dampak program parenting yang dilakukan oleh Pusat Pembelajaran Keluarga (Puspaga) Kecamatan Sumbawa.

Kebijakan publik adalah sebuah program yang menambahkan sarana dan prasarana dibuat oleh suatu organisasi atau institusi publik yang membutuhkan penerapan dan tujuan khalayak ramai dengan mempertimbangkan berbagai hal yang menghambat dan mendukungnya. Menurut beberapa ahli yang mengatakan tentang kebijakan publik diantaranya menurut Meter dan Horn (Syahida, 2014:11), “ kebijakan publik selalu mengandung setidaknya tiga komponen dasar, yaitu tujuan yang luas, sasaran yang spesifik dan cara mencapai sasaran tersebut. Dengan demikian, komponen ketiga dari suatu kebijakan yaitu cara, merupakan komponen yang berfungsi untuk mewujudkan dua komponennya yang pertama, yaitu tujuan dan sasaran khusus. Cara ini bida disebut sebagai

implementasi, misalnya mendefinisikan implementasi kebijakan sebagai tindakan yang dilakukan oleh pemerintah maupun swasta baik secara individu maupun kelompok yang dimaksudkan untuk mencapai tujuan sebagaimana dirumuskan di dalam kebijakan.

Pengasuhan memang peran yang sangat penting dalam seluruh keluarga dan akan menentukan baik buruknya karakter seorang anak kelak. Kegagalan keluarga dalam melaksanakan tanggung jawab pengasuhan disertai lemahnya perogram pemerintah dalam membantu atau memberdayakan keluarga untuk mengasuh dan melindungi anak, dikhawatirkan akan menyebabkan anak berada dalam kondisi rentan beresiko mengalami kekerasan, eksplorasi penelantaran, dan perlakuan salah lainnya. Oleh karena itu, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) telah menyajikan program unggulan Pusat Pembelajaran Keluarga (PUSPAGA) untuk mengatasi masalah ini.

Pusat Pembelajaran Keluarga (PUSPAGA) merupakan tempat pembelajaran untuk meningkatkan kualitas kehidupan menuju keluarga sejahtera yang dilakukan oleh tenaga profesional seperti tenaga konselor, baik psikolog atau sarjana profesional bidang psikologi. Pusat Pembelajaran Keluarga (PUSPAGA) adalah bentuk layanan pencegahan di bawah koordinator Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP2KBP3A) Kabupaten Sumbawa sebagai wujud kepedulian Negara dalam meningkatkan kehidupan keluarga dan ketahanan keluarga melalui program pendidikan atau pengasuhan, keterampilan menjadi orang tua, keterampilan melindungi anak, kemampuan meningkatkan partisipasi anak dalam keluarga maupun pelayanan program konseling bagi anak dan keluarga.

Dampak adalah pengaruh kuat yang dapat berakibat positif atau negatif. Sedangkan menurut para ahli, definisi dampak adalah akibat, imbas atau pengaruh yang terjadi (baik itu negative atau positif) dari sebuah tindakan yang dilakukan oleh satu/sekelompok orang yang melakukan kegiatan tertentu.

Dampak menurut Gorys Kerap dalam Otto Soemarwoto (1998:35), adalah pengaruh yang kuat dari seseorang atau kelompok orang di dalam menjalankan tugas dan kedudukannya sesuai dengan statusnya dalam masyarakat, sehingga akan membawa akibat terhadap perubahan baik positif maupun negatif. Sedangkan menurut Otto Soemarwoto (1998:43), menyatakan dampak adalah suatu perubahan yang terjadi akibat suatu aktifitas. Aktifitas tersebut dapat bersifat alamiah baik kimia, fisik maupun biologi dan aktifitas dapat pula dilakukan oleh manusia. Dampak menurut JE. Hosio (2007:57), adalah perubahan nyata pada tingkah laku atau sikap yang dihasilkan oleh keluaran kebijakan. Berdasarkan pengertian tersebut maka dampak merupakan suatu perubahan yang nyata akibat dari keluarnya kebijakan terhadap sikap dan tingkah laku. Sedangkan menurut Irfan Islamy (2001:115), dampak kebijakan adalah akibat-akibat dan konsekuensi-konsekuensi yang ditimbulkan dengan dilaksanakannya kebijakan. Berdasarkan pendapat para ahli di atas maka dapat disimpulkan bahwa dampak adalah suatu perubahan yang terjadi sebagai akibat dari suatu aktivitas atau tindakan yang dilaksanakan sebelumnya yang merupakan konsekuensi dari dilaksanakannya suatu kebijakan sehingga akan membawa perubahan baik positif maupun negatif. Menurut Finsterbusch dan Motz dalam Tangkilisan (2003:28).

Pengertian dampak menurut Kamus Lengkap Bahasa Indonesia, adalah pengaruh sesuatu yang menimbulkan akibat; benturan; benturan yang cukup hebat sehingga menimbulkan perubahan (Kamus Lengkap Bahasa Indonesia, 2003: 234). Secara etimologis dampak berarti pelanggaran, tubrukan atau benturan (Soerjono Soekanto, 2005:429). Pada mulanya istilah dampak digunakan sebagai padanan istilah dalam Bahasa Inggris yakni kata *impact*. Makna *impact* dalam Bahasa Inggris ialah tabrakan badan ; benturan. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, dampak berarti benturan; pengaruh kuat yang mendatangkan akibat (baik negatif maupun positif). Peneliti menyimpulkan bahwa dampak adalah segala sesuatu yang timbul akibat adanya suatu kejadian atau pembangunan yang ada didalam masyarakat dan menghasilkan perubahan yang berpengaruh positif ataupun negatif terhadap kelangsungan hidup. Pengaruh positif berarti menunjukkan perubahan kearah yang lebih baik, sedangkan pengaruh negatif berarti menunjukkan perubahan kearah yang lebih buruk dari sebelum adanya pembangunan yang dilakukan. Pergeseran perilaku masyarakat dan adanya konflik-

konflik kecil yang muncul merupakan salah satu dampak negatif yang ada. Dampak positif dan negatif selalu ada beriringan dengan adanya suatu perubahan sosial didalam masyarakat.

Dampak diartikan sebagai benturan antara dua benda yang mempunyai pengaruh yang sangat kuat, menandatangani akibat negatif atau positif sehingga menyebabkan penambahan yang berarti dalam momentum (pasa) sistem yang mengalami benturan itu (Poerwadarminto) 198:1085.

Dampak program parenting terhadap pengasuhan orang tua :

- a. Sopan memperlakukan anak Prameswari (2016:62) menyatakan bahwa setiap anak menginginkan diperlakukan dengan baik, sopan dan bijak. Perasaan senang dipuji termasuk salah satu bukti bahwa pujian ialah hal yang mereka butuhkan. Pujian termasuk salah satu bentuk penghormatan, sikap kesopanan yang sangat disukai oleh siapa pun termasuk anak. Orang tua yang mengikuti program parenting di Puspaga sudah mulai sopan memperlakukan anak-anak.
- b. Menasehati dengan Lemah Lembut Prameswari (2016:19) menyatakan bahwa lemah lembut merupakan kebiasaan positif yang perlu terus dilatih oleh semua orang, terutama pasangan suami istri. Pasangan suami istri yang selalu bersikap lemah lembut merupakan sosok orang tua yang mampu menumbuhkan kebahagiaan dihati anak-anaknya, dengan melihat sikap kedua orang tuanya yang lemah lembut anak akan menerima energi positif. Sehingga anak akan tumbuh dalam kedamaian dan kelembutan. Masyarakat yang terkenal keras, berbicara dengan kasar, kekerasan dan lain sebagainya, namun setelah orang tua ataupun masyarakat yang mengikuti program parenting sudah mulai berkata dengan lemah lembut kepada anak-anak. Seperti dalam pernyataan tersebut ketika orang tua berkata lemah lembut maka anak akan tumbuh menjadi pribadi yang penuh dengan kedamaian dan kelembutan.
- c. Emosi terkontrol Prameswari (2016:103) menyatakan bahwa emosional merupakan hal negatif, meskipun sangat manusiawi dan tidak setiap orang mampu mengelola emosionalnya sendiri dengan baik. Mengelola emosi dengan baik merupakan hal yang perlu dilakukan, terutama bagi orang tua. Karena setiap orang tua menginginkan kepribadian anaknya tumbuh dan berkembang dengan baik, untuk itu orang tua harus menyadari bahwa tumbuh kembang kepribadian anak dapat berlangsung dengan baik apabila pola pengasuhan orang tua tidak dilandasi semangat emosional. Mayoritas orang tua dalam menghadapi anak sering kali memakai emosional dan kekerasan. Hal ini banyak terjadi pada orang tua yang ekonominya menengah kebawah. Rata-rata orang tua di Puspaga adalah keluarga dengan ekonomi menengah kebawah, kebanyakan orang tua sering melampiaskan kesusahan hidup kepada anak-anak mereka. Namun setelah mengikuti program parenting di Puspaga mereka sudah mulai memahami perkembangan anak dan belajar agama mereka sudah mulai bisa mengontrol emosi ketika berhadapan dengan anak.

Pengukuran dampak langsung dari program pengasuhan anak diperlukan, dan pengukuran dampak tidak langsung (terkait) juga diperlukan. (1) Ukuran dampak langsung program idealnya sesuai dengan isi dan hasil program. Variabel hasil akan menjadi paling kuat bila diukur dengan cara yang selaras dengan fokus program. (2) Ukuran dampak tidak langsung yang berdekatan dengan isi program dapat menghasilkan manfaat tambahan.

2. METODOLOGI

Penelitian implementasi kebijakan dan dampak program parenting pada pusat pembelajaran keluarga (puspaga) di Kecamatan Sumbawa Kabupaten Sumbawa Nusa Tenggara Barat dengan waktu penelitian dilakukan dari tanggal 26 Desember 2023 sampai dengan 21 Mei 2024. Jenis Penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan sifat penelitian deskriptif yang meliputi pengumpulan data dan menjawab pertanyaan yang ditujukan kepada informan sebagai subjek penelitian. Tipe yang paling umum digunakan dari penelitian deskriptif sikap atau pendapat individu, organisasi, keadaan ataupun prosedur yang dikumpulkan melalui daftar pertanyaan dalam survei, wawancara ataupun observasi (Zellatifanny dan Mudjiyanto, 2018). penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan implementasi kebijakan dan dampak program parenting pada pembelajaran keluarga (puspaga) di Kecamatan Sumbawa. Dalam melakukan teknik analisa data peneliti menggunakan analisis deskriptif yaitu

mendeskripsikan hasil temuan penelitian secara sistematis, faktual dan akurat yang disertai dengan petikan hasil wawancara.

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer yaitu dari data hasil wawancara dengan informan puspaga dan sumber data yang kedua adalah sumber data sekunder yang didapatkan dari hasil studi literatur yang dilakukan oleh peneliti dalam bentuk buku, jurnal ilmiah dan literatur lain sebagai pelengkap dari sekunder.

Pengumpulan data melalui teknik observasi yang dilakukan secara langsung oleh peneliti pada Puspaga kecamatan Sumbawa dengan tujuan untuk melihat lebih dekat dan detail terkait fenomena yang terjadi dilapangan, kemudian teknik wawancara merupakan komunikasi yang terjadi antar dua orang, yang melibatkan seseorang untuk memperoleh informasi dari seseorang lainnya dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan berdasarkan tujuan tertentu (Mulyana, 2004:180) terakhir melalui dokumentasi yang berupa informasi yang berasal dari catatan penting baik dari lembaga ataupun organisasi maupun perorangan. Peneliti menggunakan metode ini untuk berusaha mendapatkan data sekunder sebagai pendukung dari data primer. Dokumentasi dilakukan dengan cara pengumpulan foto-foto, profil lembaga, mempelajari arsip-arsip, serta berbagai bentuk data tertulis lainnya pada pusat pembelajaran keluarga di Kecamatan Sumbawa berkaitan dengan masalah yang diteliti. Instrumen yang digunakan dalam penelitian ini adalah format wawancara, observasi dan hasil dokumentasi.

Analisis merupakan suatu aktivitas yang dilakukan secara terus menerus selama penelitian berlangsung, dilakukan mulai dari mengumpulkan data sampai pada tahap penulisan laporan (Afrizal, Metode Penelitian Kualitatif, 2015 : 176). Adapun aktivitas dalam analisis data yaitu : melalui reduksi data dengan cara merangkum atau memilih hal-hal pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting dan dicari tema beserta polanya, kemudian *display data* (penyajian data) adalah memaparkan data yang telah dianalisis dan dikaji terlebih dahulu kemudian dinarasikan secara deskriptif kualitatif selanjutnya yang terakhir pengambilan kesimpulan dan verifikasi menurut Miles dan Huberman adalah penarikan kesimpulan atau dapat dikatakan sebagai verifikasi data. Verifikasi data dapat dilakukan apabila kesimpulan awal masih bersifat sementara, dan akan berubah bila tidak dibarengi dengan bukti-bukti kuat untuk mendukung pada tahap pengumpulan data berikutnya. Masalah yang timbul dalam penelitian kualitatif biasanya terletak pada sifatnya yang masih sementara dan dapat berkembang setelah peneliti terjun ke lapangan. Harapan dan penelitian kualitatif adalah dengan menemukan teori baru. Temuan itu dapat berupa gambaran suatu objek yang dianggap belum jelas setelah ada penelitian gambaran yang belum jelas itu bisa dijelaskan (Sugiyono, 2007 : 247-252).

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti berdasarkan wawancara, observasi dan telaahan laporan mengenai implementasi kebijakan puspaga Kecamatan Sumbawa ditinjau menurut Van Horn dan Van Metter mengemukakan bahwa :

A. Implementasi kebijakan dipengaruhi oleh 6 faktor sebagai berikut :

1. Tujuan dan standar kebijakan

a. Kejelasan Tujuan dan Standar Kebijakan

Tujuan dan standar harus dapat diukur dan jelas supaya bisa terealisasikan. Studi implementasi mengharuskan tujuan dan sasaran diukur dan diidentifikasi, implementasinya tidak akan berhasil atau gagal tanpa tujuan yang jelas yang dapat diukur atau dinilai. Apabila target dan standar kebijakan kabur, maka akan terjadi multitafsir dan mudah menimbulkan konflik antar penyelenggara. Dalam melaksanakan kebijakan PUSPAGA mengacu pada Buku Pedoman Standar PUSPAGA yang telah dikeluarkan oleh Kementerian PP dan PA. Berdasarkan hasil wawancara terhadap 3 informan diketahui tingkat pemahaman tujuan kebijakan Puspaga sudah cukup jelas hal ini terlihat dari jawaban mereka bahwa tujuan puspaga Tujuan Puspaga adalah (1) tersedianya “one stop service” layanan satu pintu keluarga, holistic, integrative berbasis hak anak, (2) tersedianya tempat pembelajaran keluarga melalui Pendidikan bagi orang tua, calon orang tua (remaja). Sedangkan sasaran

Puspaga adalah anak, orang tua, wali, calon orang tua (remaja dan dewasa) yang mempunyai masalah dalam pengasuhan keluarga. Pelaksanaan Puspaga Sudah sesuai dengan standar kebijakan puspaga. Untuk standar kebijakan PUSPAGA sudah ada pedoman penyelenggaraan Puspaga yang mengatur tentang standarisasi PUSPAGA dengan menggunakan sistem penilaian evaluasi untuk menilai mutu. Secara keseluruhan dapat disimpulkan bahwa dari aspek tujuan kebijakan dan sasaran kebijakan sudah terlaksana dengan baik, dalam hal ini sesuai dengan pendapat Van Horn Van Metter bahwa tujuan kebijakan tidak terlalu luas dan kompleks sehingga mudah untuk dilaksanakan para implementator.

b. Ketercapaian Sasaran di Puspaga Kecamatan Sumbawa

Dari hasil penelitian dan pengolahan data yang diperoleh dari pengurus Puspaga Kecamatan Sumbawa selama kurun waktu tahun 2024, dengan data sebagai berikut : Berdasarkan data diatas jumlah pengunjung di tahun 2024 berjumlah 43 orang pengunjung di tahun 2023 berjumlah 17, rata-rata jumlah pengunjung perbulan 4 orang dan jenis kelamin perempuan tidak ada laki-laki. Bila diliat dari jumlah pengunjung di tahun 2023 dan tahun 2024 maka ada kenaikan pengunjung sebanyak 32 Persen.



Gambar 4 2 Grafik Jumlah Klien yang berkunjung Tahun 2023-2024
Sumber data : PUSPAGA Kecamatan Sumbawa Tahun 2023-2024

Terlihat dalam grafik persentase permasalahan keluarga yang dikonsultasikan ke Puspaga Kecamatan Sumbawa sebesar 37,5% dan permasalahan anak sebesar 62,5%. Terlihat lebih besar permasalahan anak dibandingkan permasalahan keluarga.

Dari keterangan grafik ini dapat disimpulkan bahwa ketercapaian sasaran kebijakan Puspaga sudah tercapai dengan sudah dimanfaatkannya layanan Puspaga untuk warga di sekitar Kecamatan Sumbawa. Layanan Puspaga ini diharapkan dapat menjadi pedoman para keluarga atau orang tua dalam mengasuh anak dengan baik dan benar serta dapat memenuhi kebutuhan hak-hak anak.

2. Sumber Daya Manusia dan Anggaran

a. Sumber Daya Manusia

Sumber daya menjadi faktor yang sangat penting dalam implementasi suatu kebijakan, tanpa sumber daya manusia dan anggaran juga sarana dan prasarana maka tidak akan mungkin kebijakan akan terlaksana dengan baik. Sumber daya digunakan untuk memfasilitasi implementasi kebijakan.

Berdasarkan hasil penelitian tentang sumber daya manusia yang menjalankan Puspaga di Kecamatan Sumbawa untuk tenaga pelaksana berjumlah 12 orang bekerja dengan sukarela dan tidak mendapatkan gaji tetapi pengurus dengan senang hati melayani masyarakat yang membutuhkan. Potensi pengurus yaitu yang lulus S1 bergelas sarjana Pendidikan (SPd) 6 orang dan lulusan SMA 6 orang, hal ini menunjukkan bahwa 50% pengurus lulusan S1, bahkan ada Psikolog yang tersedia. Hal ini menunjukkan bahwa pembentukan pengurus sudah melibatkan orang yang berkompetensi di bidangnya, dan bersungguh-sungguh dalam

melaksanakan kebijakan puspaga. Sedangkan untuk kualitas pengurus puspaga dari hasil penelitian terlihat bahwa para pengurus puspaga di Kecamatan Sumbawa juga mempunyai kompetensi untuk memberikan nasehat atau arahan apabila ada klien yang membutuhkan saran atau pendampingan dalam mengasuh anak untuk masalah yang ringan seperti masalah fokus belajar, pola didik yang benar Misalnya ada yang konsultasi anak malas membaca, anak malas menulis, anak maunya main saja, bagaimana caranya memotivasi anak agar mau belajar tidak hanya bermain, atau membagi waktu antara belajar, bermain dan mengaji, karena porsi pembagian waktu harus tetap tidak boleh membebani anak-anak dengan jadwal yang padat, masalah seperti itu biasanya para guru atau pengurus yang menjawab. Untuk kualitas tenaga psikolog yang menangani sudah sangat kompeten terlihat dari wawancara dengan penerima manfaat bahwa setelah melakukan konsultasi dan diberikan nasehat dan pendampingan maka masalah yang dikonsultasikan ada jalan keluarnya sudah perubahan tingkah laku anak setelah menerapkan hasil konsultasi terhadap pola asuh anak.

b. Sumber Daya Anggaran

Sumber daya anggaran atau sumber daya finansial juga sangat penting untuk membiayai implementasi kebijakan. Sumber daya anggaran harus digunakan secara efisien dan efektif serta tepat sasaran. Dipastikan penggunaan anggaran sesuai kebutuhan dan tidak ada pemborosan dalam penggunaan anggaran tersebut.

Hasil penelitian didapat dari informan Ketua Puspaga di Kecamatan Sumbawa bahwa anggaran di Puspaga di Kecamatan Sumbawa tidak ada sama sekali, biaya operasional untuk listrik, air, gedung dan gaji pengurus ditanggung pemerintah Daerah Kabupaten Sumbawa yang sangat terbatas dan berharap ada anggaran untuk mengadakan sosialisasi pengasuhan yang layak untuk keluarga atau edukasi parenting bagi warga.

Hal ini menggambarkan bahwa masalah anggaran menjadi masalah yang krusial karena antara Dinas P2KBP3A dengan Puspaga Kecamatan Sumbawa sebagai binaannya mendapat anggaran untuk melaksanakan program Puspaga. Kecamatan Sumbawa membiayai semua biaya operasional sampai membiayai kegiatan sosialisasi parenting dengan membayar honor narasumber dan konsumsi bagi peserta seminar. Dinas P2KBP3A Kabupaten Sumbawa hanya membiayai honor Tenaga Psikolog.

3. Komunikasi antar organisasi

Komunikasi kebijakan berarti merupakan proses penyampaian informasi kebijakan dari pembuat kebijakan (*policy maker*) kepada pelaksana kebijakan (*policy implementator*). Informasi kebijakan publik perlu disampaikan kepada pelaku kebijakan agar pelaku kebijakan dapat mengetahui, memahami apa yang menjadi isi, tujuan, arah, kelompok sasaran (*target group*) kebijakan. Terdapat tiga hal yang menjadi komponen komunikasi yaitu transmisi, kejelasan dan konsistensi. Bila melihat faktor komunikasi, yaitu transmisi, kejelasan dan konsistensi, dari tiga komponen yang mendukung faktor tersebut, dilihat dari jawaban informan rata-rata memberikan nilai yang sangat penting. Hal ini bisa dilihat dari jawaban semua informan, baik dari pembuat kebijakan, dan pelaksana kebijakan. Hasil penelitian menurut wawancara dengan informan Ketua Puspaga Kecamatan Sumbawa terlihat bahwa komunikasi antara Dinas P2KBP3A Kabupaten Sumbawa sebagai pembina dan pendamping belum melakukan komunikasi yang baik, karena menyampaikannya masih kurang lengkap dan hanya selintas, sehingga bila ada keluhan yang kaitannya dengan pendanaan dan pengembangan program belum ada dana dan belum ada pendampingan terus menerus. Sebenarnya komunikasi tidak hanya terkait dengan pendanaan saja tetapi juga komunikasi bagaimana pengembangan program pelayanan Puspaga bisa berkelanjutan, tetapi tidak ada pendampingan dan arahan lebih lanjut oleh Dinas P2KBP3A.

Dapat disimpulkan bahwa untuk komunikasi antara dinas P2KBP3A Kabupaten Sumbawa dan Ketua Puspaga baru selintas belum ada pendampingan lebih lanjut dari P2KBP3A. tentang pengembangan Program Puspaga P2KBP3A.

4. Karakteristik Organisasi Pelaksana

a. Struktur Birokrasi

Dalam melaksanakan sebuah kebijakan maka harus diidentifikasi dan diketahui karakteristik agen pelaksana yang mencakup struktur birokrasi, norma-norma dan aturan, serta pola-pola hubungan yang terjadi berulang-ulang dalam birokrasi. Pola hubungan, birokrasi, dan norma yang terjadi pada birokrasi di mana mempengaruhi implementasi program, sehingga perlu adanya SOP agar tidak terjadi fragmentasi kelembagaan. Adanya peran dan tanggungjawab masing-masing pihak, dan dengan adanya SOP maka pelayanan Puspaga akan sesuai standar dan mudah di kontrol oleh lembaga yang berada di atasnya.

Adanya pola hubungan antara pembuat keputusan dan pelaksana kebijakan penting dilakukan, agar dapat mencapai keberhasilan dan untuk mengetahui apakah program tersebut sudah berjalan dengan baik dan terarah serta mencapai target yang telah ditentukan atau belum. Hal lain yang penting juga dilakukan adanya monitoring evaluasi dan pelaporan sebagai bahan evaluasi agar kebijakan tersebut berjalan dengan baik. Hasil penelitian bahwa Kementerian PP dan PA telah membuat kebijakan dan mendorong provinsi/ kabupaten/kota untuk mengembangkan lembagalayanan PUSPAGA dengan mengacu pada Pedoman Standar yang ditetapkan oleh Kemen PP PA. Kementerian PP dan PA sudah melakukan tugas sesuai kewenangannya.

Hal ini sesuai dengan pendapat Van Mater Van Horn adanya tingkat pengawasan hirarkis terhadap keputusan publik yang di buat juga adanya pengawasan dalam proses-proses pelaksanaan kebijakan. Dalam hal ini tingkat hirarki tertinggi Kemen PP da PA sebagai Lembaga pembuat dan pengawas kebijakan serta yang mendorong Gubernur/Bupati/Walikota untuk mengembangkan layanan Puspaga, hirarki tingkat 2 yaitu P2KBP3A sebagai unit yang melaksanakan dan membentuk Puspaga, dan hirarki ke 3 yaitu Puspaga Kecamatan Sumbawa yang melaksanakan kebijakan Puspaga, melayani langsung ke masyarakat dengan membuka layanan untuk konsultasi. Dapat disimpulkan bahwa dalam struktur organisasi pola hubungan sudah berjalan dengan baik, karena masing-masing pihak sudah melaksanakan sesuai dengan tugas dan tanggung jawabnya. Hal ini sesuai dengan pendapat Van Horn Van Metter tentang ciri-ciri lembaga pelaksana yang melaksanakan kebijakan : (a) ukuran dan kompetensi staf lembaga (b) tingkat kontrol hirarkis atas keputusan dan proses sub unit pada lembaga pelaksana (c) sumber daya politik sebuah lembaga (d) vitalitas organisasikomunikasi horizontal dan vertikal (e) hubungan lembaga formal dan informal.

b. SOP Pelaksanaan Kegiatan PUSPAGA

Dalam melaksanakan kebijakan diperlukan suatu panduan atau pedoman yang kita kenal dengan SOP (standar operating prosedur). Dengan adanya SOP terlihat adanya tanggung jawab dan kewenangan organisasi dan pelaksana kebijakan. Mengurangi pemborosan baik waktu dan biaya juga adanya kejelasan layanan. Berdasarkan hasil wawancara dengan 3 informan dapat disimpulkan bahwa karakteristik organisasi dalam hal ini adanya SOP sudah dilaksanakan oleh pembuat keputusan, dan pelaksana kebijakan. Kementerian PP dan PA sudah membuat buku Standar Pelaksanaan Pupaga sudah memuat SOP yang harus dilaksanakan oleh para pelaksana kebijakan. P2KBP3A juga sudah membuat SOP dan melaksanakan SOP tersebut. Puspaga Kecamatan Sumbawa juga sudah melaksanakan SOP tersebut untuk melayani warga yang membutuhkan layanan.

Memang Puspaga Kecamatan Sumbawa belum mengikuti standarisasi seperti yang tercantum dalam Buku Pedoman Standar Puspaga, hal ini disebabkan belum adanya pendampingan yang masif oleh Dinas P2KBP3A. Dan Ketua Puspaga sendiri mengakui bahwa belum berani mengikuti standarisasi karena masih bingung belum ada pembinaan dari Dinas P2KBP3A Kabupaten Sumbawa.

5. Sikap Para Pelaksana

Salah satu faktor yang mempengaruhi implementasi adalah sikap para pelaksana, sikap penerimaan atau penolakan dari agen pelaksana kebijakan sangat mempengaruhi keberhasilan atau kegagalan. Untuk melaksanakan sebuah program dibutuhkan komitmen para pelaksana, jika

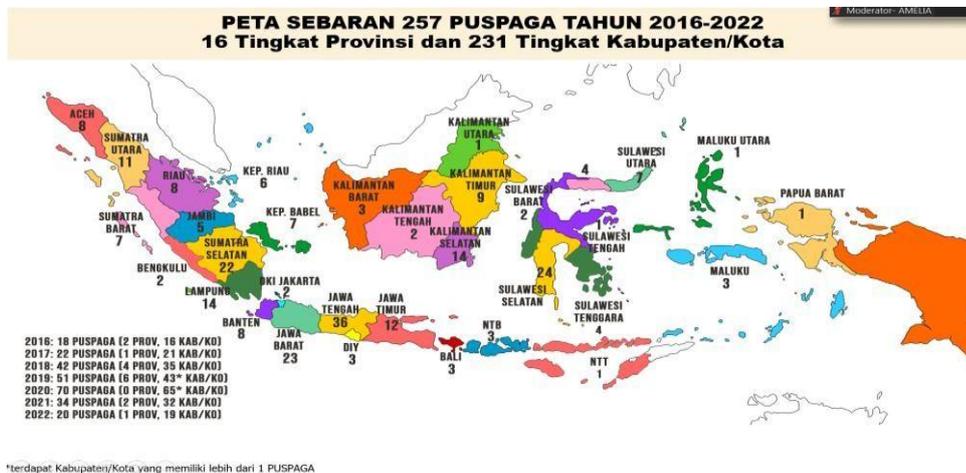
mereka menyetujui dari isi kebijakan maka akan melaksanakan dengan baik, jika tidak menyetujui dengan isi kebijakan tersebut maka kebijakan tidak akan berjalan dengan baik atau gagal. Sikap mereka itu dipengaruhi oleh pandangannya terhadap suatu kebijakan dan cara melihat pengaruh kebijakan itu terhadap kepentingan-kepentingan organisasinya dan kepentingan pribadinya. Hasil penelitian menunjukkan kebijakan puspaga yang dikeluarkan di Kementerian PP dan PA sudah dilaksanakan di Kabupaten/Kota seluruh Indonesia, terbukti telah dilaksanakan di 257 kabupaten/kota dari 514, sudah tercapai 50 persen.



Sumber : Asdep Pemenuhan Hak Anak Atas Pengasuhan

Terlihat dari gambar milestone pertumbuhan Puspaga di Indonesia selama kurun waktu 7 tahun program ini di inisiasi, terlihat di tahun 2016 hanya 18 Puspaga, di tahun 2017 sebanyak 41 Puspaga, di tahun 2018 sebanyak 80 Puspaga, di tahun 2019 sebanyak 130 Puspaga dan di tahun 2020 sebanyak 180 Puspaga dan di tahun 2023 meningkat menjadi 194 Puspaga dan tahun 2024 sebanyak 257 Puspaga, dengan melihat milestone ini dapat di katakan bahwa kebijakan Puspaga berhasil dilaksanakan di daerah terlihat setiap tahun ada kenaikan dan tidak ada penurunan.

Peta sebaran Puspaga di Indonesia tahun 2023-2024



Masih menurut Informan 2, pembiayaan pelaksanaan Puspaga ada yang dibiayai secara mandiri atau dari APBN dan APBD. Dengan adanya pembiayaan mandiri terlihat bahwa

adanya dukungan dari Lembaga masyarakat untuk ikut terlibat melaksanakan kebijakan tersebut. Sedangkan anggaran dari APBD menunjukkan adanya komitmen dari para pelaksanaan untuk memasukkan Kebijakan Puspaga ke dalam rencana kerja daerah untuk memperoleh anggaran. Hasil wawancara dengan Dinas P2KBP3A Kabupaten Sumbawa sudah membentuk 5 Puspaga di 5 kecamatan, sedangkan target tahun yang akan datang disemua kecamatan ada layanan Puspaganya. Sedangkan pembiayaan dari Dinas PP2KBP3A kabupaten Sumbawa memperoleh informasi bahwa sudah memasukkan anggaran Puspaga ke APBD sebesar Rp. 90.000.000 untuk 5 Puspaga, hal ini menunjukkan bahwa program Puspaga sudah masuk ke dalam rencana kerja daerah (Renja) dan mendapatkan anggaran dari APBD. Sedangkan hasil wawancara dengan Ketua terlihat Ketua dan pengurus mendukung kebijakan Puspaga malah senang membantu kesulitan orang lain.

Tidak hanya masalah keluarga tetapi masalah kekurangan ekonomi atau warga yang tidak mampu juga dibantu. Dalam memberikan pelayanan Puspaga Kecamatan Sumbawa juga tidak membedakan klien dari keluarga mampu atau tidak mampu semua dilayani dengan baik. Dari pendapat ke 3 informan dalam penelitian ini menunjukkan bahwa Masyarakat sangat mendukung kebijakan Puspaga, sesuai dengan pendapat Van Horn dan Van Metter Nugroho, (2020 P.738) . Ada 3 faktor yang mempengaruhi, yaitu respon implementor terhadap kebijakan, pemahaman kebijakan, dan intensitas implementor. Dapat disimpulkan bahwa respon terhadap kebijakan Puspaga sangat baik dan dilaksanakan sampai tingkat kecamatan bahkan dengan biaya mandiri, pemahaman terhadap kebijakan juga sama antara pembuat kebijakan Kemen PP dan PA dan implementator Dinas P2KBP3A juga Puspaga Kecamatan Sumbawa. Dari data yang diperoleh Puspaga Kecamatan Sumbawa terlihat banyaknya klien mendatangi Puspaga yang berarti bahwa Puspaga Kecamatan Sumbawa inten memberikan pelayanan dan membuka unit layanan setiap jam kerja.

6. Lingkungan Sosial, politik dan ekonomi

Menurut Van Meter Van Horn lingkungan external ikut mempengaruhi pelaksanaan kebijakan publik, lembaga eksternal dapat mempengaruhi sukses atau tidaknya pelaksanaan kebijakan publik.

a. Lingkungan Sosial

Hasil penelitian menunjukkan adanya dukungan sosial terhadap keberadaan Puspaga Kecamatan Sumbawa didapat dari Kanit Binmas Kapolsek Sumbawa kota bahwa Polsek mendukung adanya program ini, kalau ada Lembaga yang memberikan bantuan konsultasi untuk pengasuhan anak, sehingga anak bisa di arahkan dan dinasehati untuk tidak melakukan perbuatan yang melanggar hukum dan itu bisa membantu para orang tua untuk pencegahan secara dini, sekaligus membantu Polres ketika ada permasalahan terkait anak bisa kami sarankan orang tua untuk melakukan konseling kepada Puspaga dan Polsek juga sedang mengalakkan sosialisasi pencegahan tawuran pelajar karena akhir-akhir ini kita sedang direpotkan dengan tawuran pelajar namun di wilayah kami hingga saat ini tidak ada. Dengan adanya lembaga layanan untuk konsultasi keluarga di harapkan anak-anak mendapatkan pengasuhan dan pengawasan yang baik dari orang tuanya, sehingga tidak ada tawuran pelajar atau bullying dan menurunnya kasus kekerasan terhadap anak.

Dukungan sosial Sekretaris Kecamatan Sumbawa bahwa pihak Kecamatan Sumbawa juga mendukung kebijakan puspaga terlihat masing-masing sudah menjalankan program Puspaga, terbentuk di 12 desa dan 1 kelurahan, di harapkan dengan adanya PUSPAGA orang tua dapat mengasuh dan merawat anak sesuai dengan hak-hak anak, tidak ada lagi kekerasan terhadap anak atau kekerasan dalam keluarga. Dukungan dari warga sekitar terlihat dari Informan 6 (Penerima manfaat atau wargasekitar) Dari jawaban para penerima manfaat dan lingkungan mendukung sekali program ini karena bermanfaat bagi masyarakat, malah kadang Ketua Puspaga memberikan bantuan bila ada warga yang tidak mampu agar anak-anak tetap sekolah.

b. Lingkungan ekonomi

Hasil penelitian menurut Sekretaris Kecamatan Sumbawa bahwa Pihak Kecamatan

Sumbawa juga sudah memikirkan bahwa keluarga juga harus mempunyai ketahanan ekonomi, dengan adanya ketahanan ekonomi diharapkan kebutuhan keluarga akan tercukupi, sehingga keluarga tidak akan melakukan kekerasan terhadap anak, hak-hak kebutuhan dasar anak akan tercukupi.

c. Lingkungan Politik

Sedangkan faktor politik masih menurut Sekcam bahwa Kebijakan Puspaga sangat di dukung oleh masyarakat dan stake holder (OPD) karena sangat dibutuhkan untuk tindakan preventif atau untuk pencegahan kekerasan terhadap anak dan untuk layanan konsultasi bagi keluarga yang membutuhkan pendampingan.

B. Dampak Program Parenting yang dilakukan oleh Pusat Pembelajaran Keluarga (Puspaga) Kecamatan Sumbawa adalah :

1. keberhasilan kegiatan / program parenting di Pusat Pembelajaran Keluarga (Puspaga) Kecamatan Sumbawa yaitu :
 - a. Menjelaskan tentang program parenting
 - b. Memberikan pemahaman tentang kewajiban orang tua terhadap anak dengan cara mengedukasi orang tua
 - c. Memberikan gambaran masa kehamilan hingga persalinan ibu dalam bentuk video agar orang tua menyentuh hati nurani ketika mengingat kebahagiaan saat mengandung
 - d. Diskusi/sharing orang tua
2. Keberhasilan sasaran kegiatan/program parenting di Pusat Pembelajaran Keluarga (Puspaga) Kecamatan Sumbawa

Sasaran kegiatan/program merupakan target dari Pusat Pembelajaran Keluarga (Puspaga) yang hendak dijadikan sebagai proses program parenting dengan maksud agar program ini memiliki nilai kebermanfaatannya yang lebih tinggi bagi orang tua. Dalam pemberian kegiatan parenting, Pusat Pembelajaran Keluarga (Puspaga) memilih orang tua dari mulai tingkat TK, SD, SMP dan SMA selain itu Puspaga juga melakukan sosialisasi ke Majelis Taklim atau tempat-tempat perkumpulan lainnya untuk menyampaikan suatu ilmu yang bermanfaat terutama masalah pengasuhan, agar tetap pada sasaran.

Berdasarkan hasil temuan penulis, dapat diperoleh suatu pengukuran yaitu :

1. Dampak langsung program idealnya sesuai dengan isi dan hasil program. Variabel hasil akan menjadi paling kuat bila diukur dengan cara yang selaras dengan fokus program.
2. Dampak tidak langsung yang berdekatan dengan isi program dapat menghasilkan manfaat tambahan.

4. KESIMPULAN

Peneliti dapat menyimpulkan bahwa implementasi kebijakan berjalan linier dari kebijakan publik, pelaksana dan kinerja kebijakan publik. Adapun indikator kinerja kebijakan antara lain : tujuan dan standar kebijakan, sumber daya manusia dan anggaran, komunikasi antar organisasi, karakteristik organisasi pelaksana, sikap para pelaksana dan lingkungan sosial, politik dan ekonomi. Sedangkan dampak program parenting yang dilakukan oleh pusat pembelajaran keluarga (Puspaga) Kecamatan Sumbawa bahwa ukuran dampak langsung program idealnya sesuai dengan isi dan hasil program variabel hasil akan menjadi paling kuat bila diukur dengan cara yang selaras dengan fokus program dan ukuran dampak tidak langsung yang berdekatan dengan isi program dapat menghasilkan manfaat tambahan. Ukuran dan dampak ini bersifat kualitatif (berdasarkan pada mutu). Jika kegiatan telah berhasil dilaksanakan dan tepat sasaran maka kegiatan akan dikatakan berdampak bila pelaksana dan penerima manfaat sama-sama merasakan kepuasan dalam kegiatan tersebut.

Untuk mencapai implementasi kebijakan dan dampak program parenting pada Pusat Pembelajaran Keluarga (Puspaga) Kecamatan Sumbawa yang kita harapkan maka penulis dapat menyarankan agar kepada pengambil kebijakan pada tingkat kabupaten hendaknya selalu menjadikan puspaga sebagai program prioritas untuk membantu anak-anak, remaja agar menjadi generasi yang

berkualitas baik dari aspek pendidikan, kesehatan maupun kestabilan fisik dan mental. Juga pengurus dan fasilitas puspa hendaknya membuat program kerja jangka pendek, menengah dan panjang serta melakukan koordinasi dengan stake holder terkait baik dengan pemerintah, swasta dan perguruan tinggi agar puspa dapat menjalankan kegiatan yang mendukung pembangunan khususnya pemberdayaan perempuan dan anak.

5. DAFTAR PUSTAKA

- Afrizal. (2015). Metode Penelitian Kualitatif. In Afrizal, *Metode Penelitian Kualitatif* (p. 13). Jakarta: Rajawali Pers.
- Alvina Dewi Hafsa (2023). *Policy Output Analysis pada Pencegahan Kekerasan Anak dalam Keluarga melalui Layanan Puspaga di Surabaya*. JIAP I Jurnal Ilmu Administrasi Publik.
- Anggie Amalia Rukmana Sibarani (2024). *Peran Pusat Pembelajaran Keluarga (Puspaga) dalam Pelayanan Masyarakat di Balai RW 5 Kelurahan Lidah Kulon Surabaya*. Community Engagement & Emergence Journal.
- Cut Annisa Fitriati, Safrida, Agus Pratama, Nodi Marefanda (2023). *Implementasi Pusat Pembelajaran Keluarga (Puspaga) dalam merealisasikan Lingkungan Ramah Perempuan dan Peduli Anak Kabupaten Nagan Raya*. Dialogue : Jurnal Ilmu Administrasi Publik.
- Dharma Wicaksana Putra (2023). *Peran Puspaga dalam Upaya Pencegahan Kekerasan terhadap anak di Wilayah Kelurahan Made, Kecamatan Sambikerep Kota Surabaya*. Jurnal Ilmu Hukum dan Tata Negara.
- Diana Safitri, Katerina Baraha (2022). *Menyelamatkan Harmoni Keluarga Implementasi Pusat Pembelajaran Keluarga di Klampis*. Journal Publicuho is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.
- Djamarah, S. B. (2014). *Pola Asuh Orang Tua dan Komunikasi dalam Keluarga*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Dye, T. R. (2017). *Understanding Public Policy*. In *Understanding Public Policy*. Emzir. (2008). *Metodologi Penelitian Pendidikan Kuantitatif dan Kualitatif*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Elfira, I. d. (2015). PENGARUH KONSELING PRANIKAH SOLUTION FOCUSED TERHADAP PENINGKATAN KONSEP KELUARGA SAKINAH CALONPENGANTIN. 136-137.
- Fachrina Bella Syahputri (2022). *Peran Puspaga dalam Pencegahan Kekerasan pada Anak*. JKPP (Jurnal Kesejahteraan Keluarga dan Pendidikan).
- Grindel, M. (2017). *Politics and Policy Implementation in The Thrid World* (p. 310).
- Husniyah, A. (2019). "Parenting Bagi Orang Tua Muda di Pusat Pembelajaran Keluarga Surabaya Perspektif Abdullah Nashih 'Ulwan." *Al-Hukama*,9(1),172-194. <https://doi.org/10.15642/alhukama.2019.9.1.172-194>.
- Marsya Sabilla Boreel, Dine Meigawati, M. Rijal Amirulloh (2022). *Implementasi Program Pusat Pembelajaran Keluarga (Puspaga) dalam Upaya pencegahan kekerasan pada anak di Kota Sukabumi*. Jurnal Inovasi Penelitian. ISSN 2722-9475 (Cetak). ISSN 22722-9467 (Online).
- Novia Razmuliani, Yani Achdiani, Ana (2022). *Pengembangan Vidio penyuluhan Bahasa Kasih Remaja Putri menggunakan Canva di Pusat Pembelajaran Keluarga Kota Bandung*. JKPP

(Jurnal Kesejahteraan Keluarga dan Pendidikan).

Putri Amalia Zahroh, Oktarizka Reviandani (2022). *Peran Fasilitator Puspaga dalam pencegahan kekerasan (Bullying) melalui Sosialisasi Edukasi "Puspaga Goes To School"*. Journal Publichuo is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

Rachman, R. F. (2019). "Implementasi Kebijakan Pusat Konseling Anak Dan Remaja Di Surabaya." *Al-Tazkiah: Jurnal Bimbingan Dan ...*, 8(2), 77–91. <https://journal.uinmataram.ac.id/index.php/altazkiah/article/view/1217>.

Sugiyono. (2019). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D*. Bandung : Alfabeta.

Taufiq Ramadhan, Naziah Diniyah. (2022). *Efektivitas Pusat Pembelajaran Keluarga (Puspaga) dalam Pencegahan Kasus Kekerasan pada Anak di Tangerang Selatan*. Sahaja : Journal Sahariah And Humanities.

Wahab, S. A. (2017). *Analisis Kebijakan Dari Formulasi ke Penyusunan Model-model Implementasi Kebijakan Publik*. Jakarta: PT Bumi Aksara.

Yusuf, M. (2017). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Penelitian Gabungan* (p.480). Jakarta : PT. Fajar Interpretama M.